

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan segenap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ini dapat disusun, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2016 berisi Sasaran Strategis, Indikator kinerja, dan Target yang akan dicapai pada tahun 2016 beserta anggaran dari program-program yang mendukung pencapaian sasaran dengan 15 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja.

Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2016.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, Januari 2016

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


HAMENGGU BUWONO X

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2016 |
|----|---|---|--------|-------------|
| 1 | Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya | Persen | 68,58 |
| 2 | Melek Huruf masyarakat meningkat | Angka Melek Huruf | Persen | 94,65 |
| 3 | Aksesibilitas pendidikan meningkat | Rata-rata lama sekolah | Persen | 11,60 |
| 4 | Daya saing pendidikan meningkat | Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya | Persen | 20,00 |
| 5 | Harapan Hidup Masyarakat Meningkat | Angka Harapan Hidup | Tahun | 73,96 |
| 6 | Pendapatan masyarakat meningkat | Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). | Juta | 8,20 |
| 7 | Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun | Indeks Ketimpangan Antar Wilayah | Indeks | 0,4455 |
| 8 | Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun | Indeks Ketimpangan Pendapatan. | Indeks | 0,2888 |
| 9 | Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara meningkat | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 4.071.753 |
| | | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 345.503 |
| 10 | Lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara meningkat | Lama tinggal Wisatawan Nusantara | Hari | 2,45 |
| | | Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara | Hari | 2,45 |
| 11 | Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah meningkat | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Nilai | A |
| 12 | Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat | Opini Pemeriksaan BPK | Opini | WTP |
| 13 | Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan | <i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat | Persen | 40,57 |
| 14 | Kualitas lingkungan hidup meningkat | Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan | Persen | 12,58 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2016 |
|----|------------------------------|--|--------|-------------|
| 15 | Pemanfaatan Ruang terkendali | Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat. | Persen | 64,50 |

Jumlah Program Utama yang mendukung Sasaran Pemda DIY sebanyak 234 Program dengan anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp2.120.230.187.832,00.

Yogyakarta, Januari 2016

**GUBERNUR
DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA**



HAMENGKU BUWONO X

PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Gubernur DIY merupakan target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur DIY pada tahun 2016. Perjanjian kinerja disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan kapasitas pembiayaan Pemda.

PENJELASAN UMUM

Perencanaan pembangunan di DIY mengalami dinamika yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian. Pembangunan lima tahunan di DIY didasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah. RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan dua kali *review*. *Review* pertama kali dilakukan pada tahun 2014 yang difokuskan pada perubahan target kinerja sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat indikator kinerja yang telah melampaui target sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 diatur melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No. 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang mengalami perubahan target capaian tahunan, yaitu:

1. Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya pada sasaran peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
2. Indikator angka harapan hidup pada sasaran harapan hidup masyarakat meningkat;
3. Indikator jumlah wisatawan nusantara pada sasaran kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;

4. Indikator jumlah wisatawan mancanegara pada sasaran kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
5. Indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah pada sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
6. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat pada sasaran pemanfaatan ruang terkendali.

Review terhadap RPJMD DIY 2012-2017 yang kedua dilakukan pada tahun 2015 terkait dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang didasarkan pada Perda No 3 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah DIY sebagai wujud implementasi dari UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya perubahan SOTK tersebut perlu ditindaklanjuti dengan *review* terhadap dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing sektor. Fokus *review* RPJMD DIY 2012-2017 terkait dengan perubahan SOTK adalah relevansi tujuan, sasaran, program & kegiatan. RPJMD DIY 2012-2015 hasil *review* tahun 2015 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 118 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang ditetapkan sebagaimana dimuat dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah di *review* pada tahun 2015. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 juga memperhatikan capaian kinerja kumulatif RPJMD DIY Tahun 2012-2017 sampai dengan tahun 2015, serta dengan memperhatikan dukungan pendanaan yang tersedia pada tahun 2016.

PENJELASAN KHUSUS

Penjelasan khusus memuat uraian atas penetapan target dari setiap sasaran pada tahun 2016.

- a. Sasaran pertama adalah “Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan”. Visi jangka panjang DIY Tahun 2025 adalah sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Sesuai dengan visi tersebut, budaya menjadi salah satu pilar strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan pada bidang budaya diperlukan adanya indikator yang dapat mengetahui tingkat peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Indikator yang relevan untuk mengukur sasaran dimaksud adalah derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Indikator ini dihitung dari jumlah desa budaya maju dan jumlah organisasi budaya yang tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2015, realisasi indikator tersebut sebesar 69,04 telah memenuhi target sebesar 67,28, atau persentase realisasinya sebesar 102,62%. Target indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 68,58. Angka tersebut mengacu pada target yang ada dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah di *review*.
- b. Sasaran kedua, yaitu “Melek Huruf Masyarakat Meningkatkan” dengan indikator “Angka Melek Huruf”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Unsur penting dalam IPM salah satunya adalah melek huruf. Untuk mengetahui tingkat melek huruf dimaksud indikator yang digunakan adalah Angka Melek Huruf. Indikator ini menggambarkan tingkat penuntasan buta aksara yang menjadi fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan secara umum.

Pada tahun 2015, ditetapkan target sebesar 93,85%, dan realisasinya menunjukkan pencapaian sebesar 94,44% atau sebesar 100,63% dari target.

Dengan mendasarkan pada capaian kinerja pada tahun 2015, maka untuk target kinerja indikator angka melek huruf tahun 2016 ditetapkan sebesar 94,64.

- c. Sasaran ketiga, yaitu “Aksesibilitas Pendidikan Meningkat”, dengan indikator “Rata-rata Lama Sekolah”. Visi jangka panjang DIY Tahun 2025 adalah sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Indikator yang dipilih untuk mengukur sasaran ini adalah “Rata-rata Lama Sekolah”. Indikator ini menggambarkan rata-rata tingkat pendidikan formal yang dapat diselesaikan dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2015, dari target 10,80 tahun, realisasinya belum sesuai target, yaitu 8,84 tahun. Angka realisasi tahun 2015 tersebut mengacu pada hasil penghitungan BPS dengan menggunakan metode terbaru, yaitu rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas (sebelumnya dihitung dari penduduk usia 15 tahun ke atas). Berdasarkan RPJMD *review*, rata-rata lama sekolah untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 11,60.
- d. Sasaran keempat “Daya Saing Pendidikan Meningkat”. Untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara, harus didukung dengan satuan pendidikan yang memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi tersebut ditempuh dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang bertaraf nasional maupun internasional dengan mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dengan meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya. Harapannya adalah agar pendidikan dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa, memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelegensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” dengan melihat jumlah sekolah di DIY yang menerapkan pendidikan berbasis budaya. Pada tahun 2015, satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya ditargetkan sebesar 10%. Capaian pada tahun 2015 sebesar 15,77% atau dengan kata lain telah memenuhi target. Sedangkan untuk tahun 2016, satuan pendidikan yang

menerapkan model pendidikan berbasis budaya ditargetkan sebesar 20% atau naik 100% dibandingkan tahun 2015.

- e. Sasaran kelima “Harapan Hidup Masyarakat Meningkat” dengan indikator “Angka Harapan Hidup”. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh akses terhadap perawatan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan akses pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2015, dari target kinerja sebesar 73,81 tahun, realisasi kinerja menunjukkan pencapaian sebesar 74,5 tahun, atau mencapai 100,93%. Dengan pertimbangan capaian pada tahun 2015, maka target kinerja indikator angka harapan hidup pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 73,96. Angka tersebut didasarkan pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah di *review*.
- f. Sasaran keenam adalah “Pendapatan Masyarakat Meningkat”, dengan indikator “Pendapatan Per Kapita Per Tahun”. Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu daerah. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Capaian pembangunan peningkatan pendapatan merupakan hasil yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dan masyarakat yang juga dapat menggambarkan manfaat terhadap akses pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui pendapatan masyarakat digunakan indikator “Pendapatan Per kapita per tahun”. Indikator ini dihitung melalui hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY dengan jumlah penduduk DIY. Pada tahun 2015, Pemda DIY menargetkan pendapatan per kapita sebesar Rp 7,80 juta, yang realisasinya berhasil dicapai sebesar Rp22,68 juta per kapita. Angka realisasi dengan target pendapatan per kapita per tahun terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dikarenakan oleh adanya perubahan tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDRB oleh BPS, dimana pada saat penetapan target menggunakan tahun dasar 2000 sedangkan realisasi menggunakan tahun dasar 2010. Mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2012-2017 hasil *review*,

target kinerja pendapatan per kapita per tahun untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 8,20 juta.

- g. Sasaran ketujuh adalah “Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun” dengan indikator kinerja utama adalah “Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah”. Isu kesenjangan antar-wilayah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa berimplikasi lebih jauh karena menunjukkan distribusi akses dan manfaat pembangunan yang tidak setara. Isu kesenjangan bisa menjadi faktor yang menjelaskan mengapa target-target pembangunan bisa tidak terealisasi, karena ada wilayah yang menghadapi kendala yang lebih tinggi untuk mengakselerasi pembangunan. Untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antar-wilayah digunakan indikator “Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah”. Indikator diukur dengan menggunakan indeks Williamson, yang mana semakin tinggi angkanya, menunjukkan ketimpangan antar-wilayah yang semakin lebar yang dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur jalan, sanitasi, dan pengembangan perumahan yang layak huni. Pada tahun 2015, target kinerja yang dipasang adalah 0,4465 dan realisasinya adalah sebesar 0,4480 atau sebesar 99,66% dari target. Untuk tahun 2016, target kinerja indikator ketimpangan antar wilayah ditetapkan sebesar 0,4455.
- h. Seperti halnya dengan ketimpangan antarwilayah yang ditargetkan akan semakin menurun dari waktu ke waktu, demikian juga dengan sasaran ke delapan, yaitu “Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun”. Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang dicapai masyarakat dimasing-masing daerah tidak sama. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya di masing-masing daerah didukung dengan penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkonsolidasikan upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Untuk sasaran ini, diukur dengan indikator “Indeks Ketimpangan Pendapatan”, yang menggunakan Indeks Gini untuk besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya

distribusi pendapatan semakin tidak merata. Pada tahun 2015, Indeks Gini yang ditargetkan adalah sebesar 0,2898, sedangkan realisasinya adalah sebesar 0,43 atau mencapai 51,62% dari target. Indeks Gini pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 0,2888.

- i. Sasaran kesembilan adalah “Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkatkan”. Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 untuk mewujudkan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Untuk mengukur keberhasilan DIY sebagai daerah tujuan wisata dapat diketahui dari tingkat kunjungan wisatawan, baik yang berasal dari nusantara maupun mancanegara. Tingkat keberhasilan tersebut diukur dengan 2 indikator, yaitu “Jumlah Wisatawan Nusantara” dan “Jumlah Wisatawan Mancanegara”. Untuk jumlah wisatawan nusantara, target pada tahun 2015 adalah sebanyak 3.581.860 orang dan realisasinya mencapai 3.813.720 orang atau 106,47%. Sedangkan untuk jumlah wisatawan mancanegara, target pada tahun 2015 adalah 261.053 orang dan realisasinya mencapai 308.485 atau 18,17%. Dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2015 dan mengacu pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah di *review*, target kinerja untuk wisatawan nusantara pada tahun 2015 ditetapkan sebanyak 4.071.753 orang sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebanyak 345.053 orang.
- j. Sasaran kesepuluh adalah “Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat”, dengan 2 indikator yaitu “Lama tinggal wisatawan nusantara” dan “Lama tinggal wisatawan mancanegara”. Selain menarik lebih banyak wisatawan yang datang, lama tinggal wisatawan juga menjadi sasaran penting karena akan berkontribusi terhadap kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan berdampak *multiplier effect* yang pada ujungnya mempunyai kontribusi dalam pembentukan PDRB. Secara ekonomi, lama tinggal yang lebih lama memberikan kesempatan untuk peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor ini. Tingkat keberhasilan tersebut diukur dengan 2 indikator yaitu “Lama tinggal wisatawan nusantara” dan “Lama tinggal wisatawan mancanegara” di hotel bintang dan nonbintang. Untuk lama tinggal wisatawan nusantara, realisasi kinerja tahun 2015 adalah

1,85 hari, lebih rendah dari target kinerja sebanyak 2,30 hari. Persen ketercapaian terhadap target sebesar 80,43%. Sedangkan untuk lama tinggal wisatawan mancanegara, realisasi kinerja tahun 2015 adalah 2,07 hari, lebih rendah dari target kinerja sebanyak 2,35 hari. Persen ketercapaian terhadap target sebesar 88,09%. Target kinerja untuk indikator lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2016 masing-masing sebesar 2,45 hari.

- k. Sasaran kesebelas adalah “Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan”. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD DIY 2012-2017, perhatian DIY akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan komponen yang dinilai yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Pada tahun 2015, dari target yang dipasang yaitu nilai A, realisasinya sudah mencapai nilai A. Dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2015 yang sudah mendapat predikat A, maka nilai akuntabilitas pada tahun 2016 predikat tersebut akan dipertahankan.
- l. Sasaran duabelas adalah “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan”, yang ditunjukkan dengan indikator berupa “Opini Pemeriksaan BPK”. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian

kinerja. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator Opini Pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Pada tahun 2015, target kerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini (kinerja sebanyak 100% atau memiliki kriteria kinerja sangat baik). Kinerja sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016 akan mempertahankan opini pemeriksaan BPK dengan predikat WTP.

- m. Sasaran ketigabelas adalah “Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan”. Penataan transportasi di DIY menjadi aspek yang sangat penting mengingat terjadinya pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Disamping itu belum baiknya manajemen dan rekayasa lalu lintas, salah satu indikasinya masalah rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, untuk mengukur sasaran dimaksud digunakan indikator *load factor* angkutan perkotaan sementara itu sasaran akses masyarakat di pedesaan perlu diukur untuk mengetahui tingkat kualitas layanan masyarakat di pedesaan seperti akses pendidikan, akses ekonomi, akses informasi, akses sosial budaya dan lain-lainnya karena dimensinya sangat luas maka sangat sulit diwakili oleh satu indikator yang berkesinambungan sehingga untuk sasaran ini hanya digunakan *load factor* angkutan perkotaan sebagai sebuah pendekatan. Sasaran ini diukur dengan indikator “*Load factor* angkutan perkotaan meningkat”. Pada tahun 2015, target kerjanya adalah sebanyak 38,57%, dan realisasinya mencapai 39,05% atau mencapai 101,24% dibandingkan target. Target indikator *Load factor* angkutan perkotaan pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 40,57%.
- n. Sasaran keempat belas adalah “Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat”, diukur dengan indikator “Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan”. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya yang perlu terus dilakukan karena merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan secara umum. Untuk menjaga

kualitas lingkungan digunakan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan yang diperoleh dari peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai. Untuk kualitas udara ambien berdasarkan hasil pengukuran pada 5 kabupaten/ kota, dengan parameter kunci yang digunakan hidro karbon (HC) dan karbon monoksida (CO). Untuk kualitas air sungai berdasarkan pada pengukuran pada 11 sungai yang mengalir di DIY, dengan parameter kunci yang digunakan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD). Pada tahun 2015, targetnya adalah sebesar 9,43%, dan realisasinya adalah sebanyak 9,17% (persen capaian 97,24% dari target). Indikator persentase peningkatan kualitas lingkungan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 12,58%.

- o. Sasaran kelimabelas adalah “Pemanfaatan Ruang Terkendali”, dengan indikator “Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat”. Pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/ Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaat ruang terhadap RTRW Kab/ kota dan RTRW Provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Pada tahun 2015, target kinerjanya adalah 64,25%, dan realisasinya mencapai 64,36%, atau mencapai 100,17%. Dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2015, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW kab/kota dan RTRW provinsi ditargetkan sebesar 64,50%. Target tersebut mengacu pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang telah di *review*.

**DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN PADA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Sasaran Startegis Ke-1: Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 1.1 Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) | 654.700.500 |
| | 1.2 Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 1.989.051.450 |
| | 1.3 Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial | 5.141.167.900 |
| | 1.4 Program Pengembangan Nilai Budaya | 19.050.000.000 |
| | 1.5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 31.415.200.000 |
| | 1.6 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 10.700.000.000 |
| | 1.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 9.500.000.000 |
| | 1.8 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 140.161.000 |
| | 1.9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Gender Dalam Pembangunan | 604.901.600 |
| | 1.10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender | 764.740.000 |
| | 1.11 Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan | 1.280.216.400 |
| | 1.12 Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan | 820.050.100 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-1 | | 82.060.188.950 |

2. Sasaran Strategis Ke-2: Melek Huruf Masyarakat Meningkatkan

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 2 | 2.1 Program Pendidikan Non Formal dan Informal | 5.325.757.000 |
| | 2.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 1.127.750.000 |
| | 2.3 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | 2.975.178.250 |
| | 2.4 Pengembangan Budaya Baca | 5.990.423.100 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-2 | | 15.419.108.350 |

3. Sasaran Strategis Ke-3: Aksesibilitas Pendidikan Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 3 | 3.1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 20.101.918.000 |
| | 3.2 Program Pendidikan Menengah | 38.406.378.000 |
| | 3.3 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus | 12.376.492.000 |
| | 3.4 Program Pendidikan Tinggi | 15.760.302.000 |
| | 3.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 4.515.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-3 | | 91.160.090.000 |

4. Sasaran Strategis Ke-4: Daya Saing Pendidikan Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| 4 | 4.1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 20.284.329.900 |
| | 4.2 Program Akselerasi Pengemabangan Pendidikan Terkemuka | 4.835.800.000 |
| | 4.3 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D | 10.000.000.000 |
| | 4.4 Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya | 3.262.700.000 |
| | 4.5 Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan | 1.472.000.000 |
| | 4.6 Peogram Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan | 4.129.000.000 |
| | 4.7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 2.992.650.000 |
| | 4.8 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 234.800.000 |
| | 4.9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 51.933.340.000 |
| | 4.10 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda | 2.242.600.000 |
| | 4.11 Program Peningkatan Prestasi Olahraga | 17.140.830.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-4 | | 118.528.049.900 |

5. Sasaran Startegis Ke-5:Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|----------------|
| 5 | 5.1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 4.166.162.500 |
| | 5.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 671.820.000 |
| | 5.3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 1.018.955.000 |
| | 5.4 Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata | 4.271.554.000 |
| | 5.5 Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan | 415.500.000 |
| | 5.6 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1.899.878.000 |
| | 5.7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELJAMKESOS | 70.000.000.000 |
| | 5.8 Program Pembinaan Kesehatan Lansia | 237.595.000 |
| | 5.9 Program Pembinaan Kesehatan Ibu | 561.700.000 |
| | 5.10 Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja | 187.700.000 |
| | 5.11 Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita | 305.000.000 |
| | 5.12 Program Pembiayaan Kesehatan | 242.196.900 |
| | 5.13 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 2.940.208.300 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 5.14 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1.898.390.575 |
| 5.15 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak | 1.521.889.500 |
| 5.16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 617.800.000 |
| 5.17 | Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 798.230.000 |
| 5.18 | Program Pengembangan Bina Keluarga | 1.121.869.700 |
| 5.19 | Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo | 8.354.943.350 |
| 5.20 | Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma | 448.041.600 |
| 5.21 | Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial | 1.485.506.700 |
| 5.22 | Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar | 1.099.849.150 |
| 5.23 | Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana | 1.630.757.500 |
| 5.24 | Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 906.844.550 |
| 5.25 | Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan | 685.765.000 |
| 5.26 | Program Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 2.025.902.700 |
| 5.27 | Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan | 465.250.000 |
| 5.28 | Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan | 1.086.098.900 |
| 5.29 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP RESPIRA | 28.408.085.000 |
| 5.30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES | 7.724.831.595 |
| 5.31 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSJ GRHASIA | 34.695.411.863 |
| 5.32 | Program Pemberdayaan Penyuluhan | 1.703.446.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-5 | | 183.597.183.383 |

6. Sasaran Strategis Ke-6: Pendapatan Masyarakat Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|---------------|
| 6 | 6.1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 2.616.545.000 |
| | 6.2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 197.800.000 |
| | 6.3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 728.970.200 |
| | 6.4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 2.913.364.650 |
| | 6.5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 7.128.297.050 |
| | 6.6 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani | 854.824.425 |
| | 6.7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 3.655.036.825 |
| | 6.8 Program Peningkatan Produksi Hortikultura | 4.122.168.950 |
| | 6.9 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 5.138.152.543 |
| | 6.10 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan | 120.647.500 |
| | 6.11 Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan | 644.779.250 |
| | 6.12 Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 1.720.772.400 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 6.13 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | 1.355.046.000 |
| 6.14 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 7.577.635.052 |
| 6.15 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 7.642.522.800 |
| 6.16 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 2.675.443.800 |
| 6.17 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Kelautan | 939.802.250 |
| 6.18 | Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan Kelautan | 827.420.400 |
| 6.19 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 3.618.635.500 |
| 6.20 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 2.744.223.800 |
| 6.21 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 1.332.378.400 |
| 6.22 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif | 1.839.000.000 |
| 6.23 | Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | 2.037.314.550 |
| 6.24 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 17.311.478.500 |
| 6.25 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 7.162.977.500 |
| 6.26 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan | 215.065.000 |
| 6.27 | Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial | 979.661.500 |
| 6.28 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | 1.178.875.000 |
| 6.29 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 948.591.000 |
| 6.30 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 2.410.700.000 |
| 6.31 | Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri | 2.241.510.000 |
| 6.32 | Program Pengembangan IKM | 2.250.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke 6 | | 97.129.639.845 |

7. Sasaran Strategi Ke-7: Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|----------------|
| 7 | 7.1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 55.600.559.250 |
| | 7.2 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | 584.244.800 |
| | 7.3 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 19.589.350.000 |
| | 7.4 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 94.803.567.000 |
| | 7.5 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum | 30.000.000.000 |
| | 7.6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 485.000.000 |
| | 7.7 Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi | 772.450.000 |
| | 7.8 Program Pengembangan Perumahan | 14.671.000.000 |
| | 7.9 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 10.038.000.000 |
| | 7.10 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | 8.066.576.600 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 7.11 | Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | 74.943.315.000 |
| 7.12 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi | 1.177.000.000 |
| 7.13 | Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur | 28.884.400.000 |
| 7.14 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 1.200.000.000 |
| 7.15 | Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi | 2.563.909.000 |
| 7.16 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 170.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-7 | | 343.549.371.650 |

8. Sasaran Strategis Ke-8: Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 8 | 8.1 Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | 4.253.237.100 |
| | 8.2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 394.976.450 |
| | 8.3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 2.933.330.000 |
| | 8.4 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 80.847.650 |
| | 8.5 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 2.947.660.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-8 | | 10.610.051.200 |

9. Sasaran Strategis Ke-9: Kunjungan Wisata Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkatkan

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 9 | 9.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 7.623.100.000 |
| | 9.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 61.315.500.000 |
| | 9.3 Program Pengembangan Kemitraan | 4.500.000.000 |
| | 9.4 Program Pelestarian Kekayaan Budaya | 510.000.000 |
| | 9.5 Program Pengembangan Kemitraan | 6.265.420.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-9 | | 80.214.020.000 |

10. Sasaran Strategis Ke-10: Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkatkan

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 10 | 10.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 5.440.500.000 |
| | 10.2 Program Pengembangan Desa Wisata | 1.973.649.500 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-10 | | 7.414.149.500 |

11. Sasaran Strategis Ke-11: Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|-----------------|
| 11 | 11.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.519.268.756 |
| | 11.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 185.961.694.044 |
| | 11.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 7.601.960.650 |
| | 11.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan | 455.210.000 |
| | 11.5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana | 1.823.541.416 |
| | 11.6 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan | 1.373.895.500 |
| | 11.7 Program Pengendalian Pembangunan Daerah | 2.175.181.800 |
| | 11.8 Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan | 554.438.000 |
| | 11.9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | 1.373.049.400 |
| | 11.10 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 4.341.506.000 |
| | 11.11 Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat | 2.772.098.000 |
| | 11.12 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal | 1.009.108.900 |
| | 11.13 Program Pengembangan Kehidupan Beragama | 3.587.737.900 |
| | 11.14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 550.000.000 |
| | 11.15 Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum | 2.395.865.000 |
| | 11.16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 390.500.000 |
| | 11.17 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah | 2.596.707.500 |
| | 11.18 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 55.164.543.300 |
| | 11.19 Program Pendidikan Kedinasan | 8.880.976.000 |
| | 11.20 Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah | 409.903.000 |
| | 11.21 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 7.866.865.000 |
| | 11.22 Program Pencegahan Dini Bencana | 5.845.000.000 |
| | 11.23 Program Penanggulangan Korban Bencana | 3.881.903.040 |
| | 11.24 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 1.742.341.750 |
| | 11.25 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 790.188.688 |
| | 11.26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 3.000.000.000 |
| | 11.27 Program Kerjasama Informaso Dengan Mas Media | 523.000.000 |
| | 11.28 Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa | 1.030.883.300 |
| | 11.29 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 1.025.000.000 |
| | 11.30 Program Pelayanan Jasa Pengujian | 3.500.000.000 |
| | 11.31 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum | 770.000.000 |
| | 11.32 Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 1.325.000.000 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| 11.33 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.280.416.810 |
| 11.34 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 793.010.000 |
| 11.35 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 499.972.950 |
| 11.36 | Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi | 4.559.096.800 |
| 11.37 | Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan | 584.589.000 |
| 11.38 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.946.300.950 |
| 11.39 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1.127.189.400 |
| 11.40 | Program Perencanaan Sosial Budaya | 2.109.779.700 |
| 11.41 | Program Pengembangan Statistik Daerah | 3.060.000.000 |
| 11.42 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda | 4.498.303.000 |
| 11.43 | Program Pemulihan Pasca Bencana | 3.553.600.000 |
| 11.44 | Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan | 400.000.000 |
| 11.45 | Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat | 1.500.000.000 |
| 11.46 | Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan | 1.476.155.000 |
| 11.47 | Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan | 600.000.000 |
| 11.48 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 3.027.901.825 |
| 11.49 | Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 2.676.150.000 |
| 11.50 | Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi | 1.042.993.400 |
| 11.51 | Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan | 8.850.000.000 |
| 11.52 | Program Penataan Pemanfaatan Tanah | 5.000.000.000 |
| 11.53 | Program Penelitian dan Pengembangan | 1.197.500.000 |
| 11.54 | Program Penegakan Perda dan Perkada | 614.944.870 |
| 11.55 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada | 399.974.020 |
| 11.56 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1.364.888.500 |
| 11.57 | Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 2.557.608.200 |
| 11.58 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 582.940.000 |
| 11.59 | Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum | 775.873.800 |
| 11.60 | Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan | 6.776.561.300 |
| 11.61 | Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 3.091.131.200 |
| 11.62 | Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 612.321.290 |
| 11.63 | Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan | 7.708.205.720 |
| 11.64 | Program Peningkatan Kapasiatas Kelembagaan Daerah | 1.800.000.000 |
| 11.65 | Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media | 3.009.173.268 |
| 11.66 | Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan | 4.758.825.000 |
| 11.67 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 194.371.950 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-11 | | 503.267.144.897 |

12. Sasaran Strategis Ke-12: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 12 | 12.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 7.036.234.925 |
| | 12.2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kabupaten/Kota | 540.814.500 |
| | 12.3 Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro | 777.625.400 |
| | 12.4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 4.113.241.800 |
| | 12.5 Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 11.278.917.905 |
| | 12.6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah | 2.561.671.575 |
| | 12.7 Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 282.584.200 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-12 | | 26.591.090.305 |

13. Sasaran Strategis Ke-13: Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat Di Pedesaan

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| 13 | 13.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 4.900.473.900 |
| | 13.2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 71.994.758.477 |
| | 13.3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 7.320.776.100 |
| | 13.4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | 50.725.300 |
| | 13.5 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1.635.699.600 |
| | 13.6 Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal | 621.721.950 |
| | 13.7 Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi | 2.170.842.200 |
| | 13.8 Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan | 8.100.000.000 |
| | 13.9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 374.000.000 |
| | 13.10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan | 3.192.364.750 |
| | 13.11 Prasarana Perhubungan | |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-13 | | 100.361.362.277 |

14. Sasaran Strategis Ke-14: Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 14 | 14.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 300.000.000 |
| | 14.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 3.823.582.100 |
| | 14.3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 5.689.000.000 |
| | 14.4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 817.524.000 |
| | 14.5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 991.325.000 |
| | 14.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 500.000.000 |
| | 14.7 Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya | 2.552.600.000 |
| | 14.8 Program Pengurangan Kawasan Kumuh | 5.550.000.000 |
| | 14.9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 2.477.086.950 |
| | 14.10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 2.034.837.990 |
| | 14.11 Program Penataan Kawasan Hutan | 1.570.434.010 |
| | 14.12 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | 415.000.000 |
| | 14.13 Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam | 1.264.280.900 |
| | 14.14 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 350.000.000 |
| | 14.15 Program Pengelolaan Persampahan | 11.990.000.000 |
| | 14.16 Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah | 6.346.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-14 | | 46.671.670.950 |

15. Sasaran Strategis Ke-15: Pemanfaatan Ruang Terkendali

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| 15 | 15.1 Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY | 1.700.000.000 |
| | 15.2 Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan | 342.949.635.000 |
| | 15.3 Program Pembinaan Pengawasan. Pengendalian. Pendayagunaan Air Tanah | 6.909.500.000 |
| | 15.4 Program Pembinaan. Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan | 4.792.405.000 |
| | 15.5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 36.600.526.625 |
| | 15.6 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan | 4.400.000.000 |
| | 15.7 Program Pengembangan Kawasan Pedesaan | 12.000.000.000 |
| | 15.8 Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung dan Lingkungan | 110.000.000 |
| | 15.9 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Desa Potensi | 4.095.000.000 |
| | 15.10 Program Pengendalian Banjir | 100.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sasaran Ke-15 | | 413.657.066.625 |